KEBIJAKAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN JKN

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

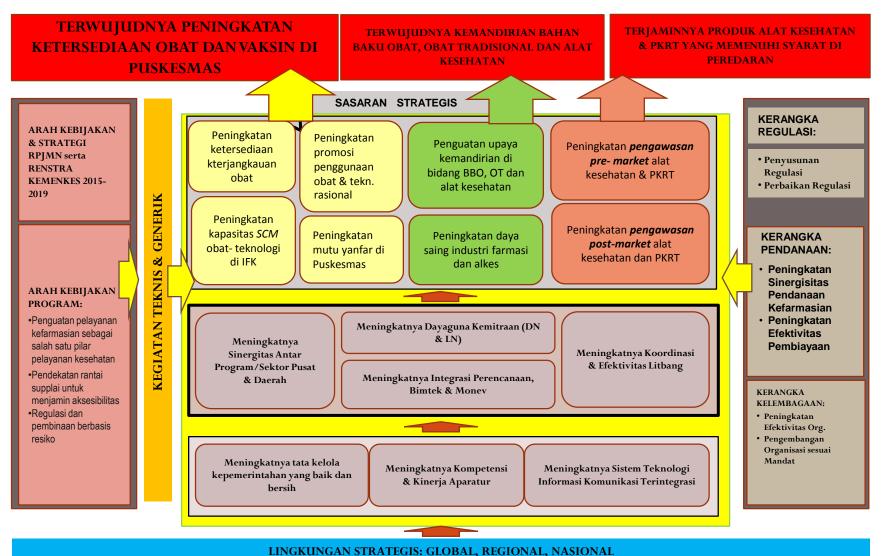
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2015 Batam, 10 Desember 2015

Sistematika Presentasi

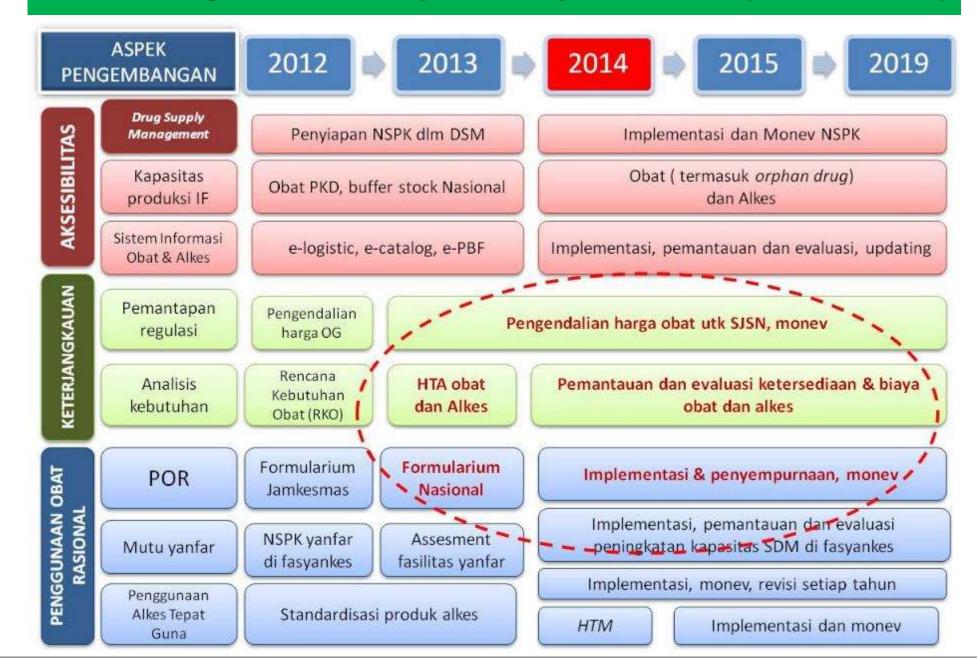
- Pendahuluan
- Kebijakan dan Strategi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Skema JKN
- Monitorin dan Evaluasi

PENDAHULUAN

PETA STRATEGI 2015-2019: KEMANDIRIAN, AKSES, MUTU SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN



ROADMAP PENGEMBANGAN FARMASI DAN ALKES



KETERKAITAN SASARAN PROGRAM DENGAN INDIKATOR 2015-2019

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TERKAIT PERAN APT
KESEHATAN	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi (350-5.600)
		Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi (233-477)
	Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (2.700-4.700)
PROGRAM KEFARMASIAN DAN	farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT): - Mutu Pelayanan Kefarmasian -Penggunaan Obat Rasional	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (77-90)
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (50-70)
		Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas (77-90)

II. KEBIJAKAN & STRATEGI PROGRAM

Kebijakan Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat

1

Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan obat generik.

2

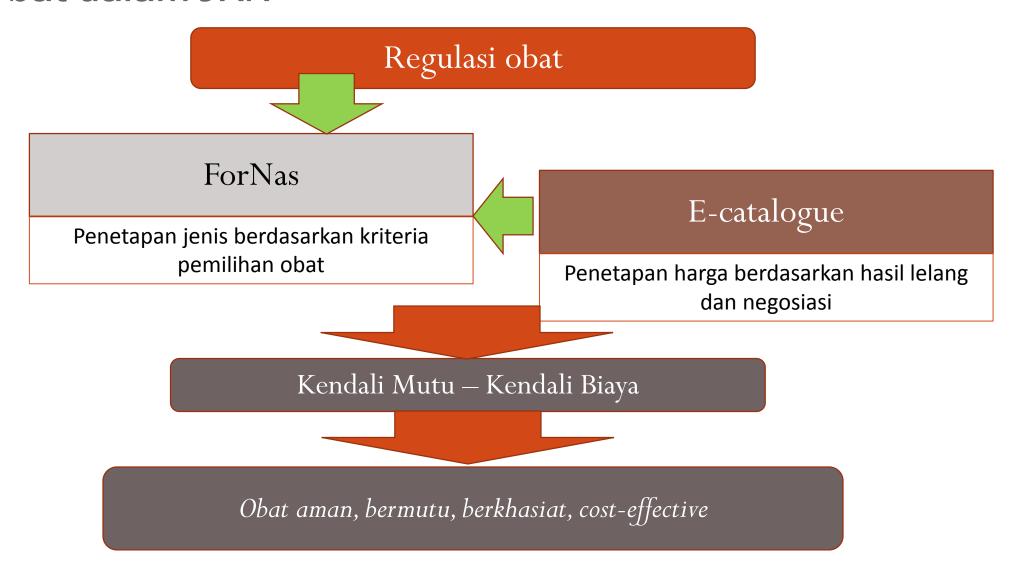
Meningkatkan implementasi FORNAS, e-katalog bersinergi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

3

Meningkatkan kemampuan produksi BBO akan membuka jalan produksi obat generik pertama dan biosimilars di Indonesia → mempengaruhi turunnya harga obat paten



Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat dalam JKN



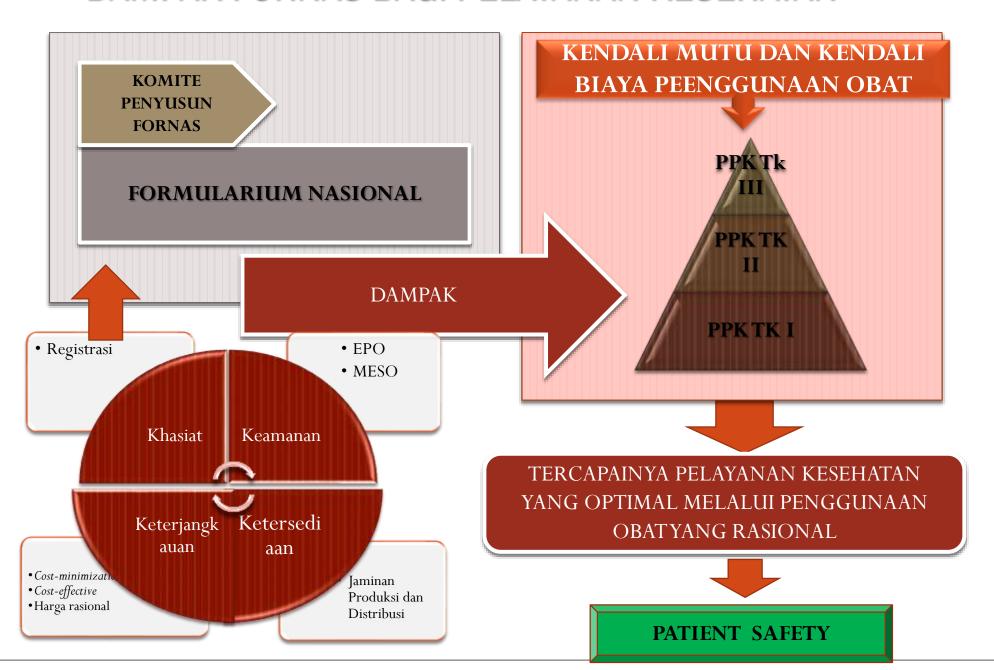
TRANSFORMASI APOTEKER DI BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN



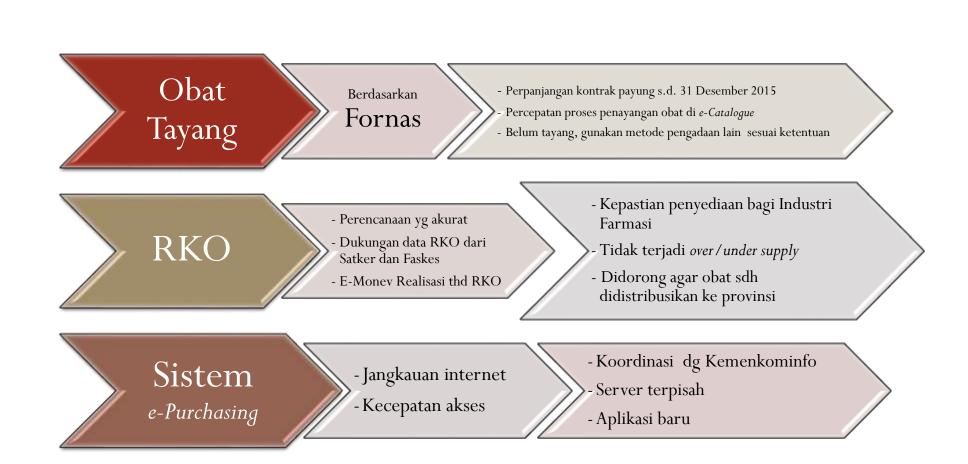


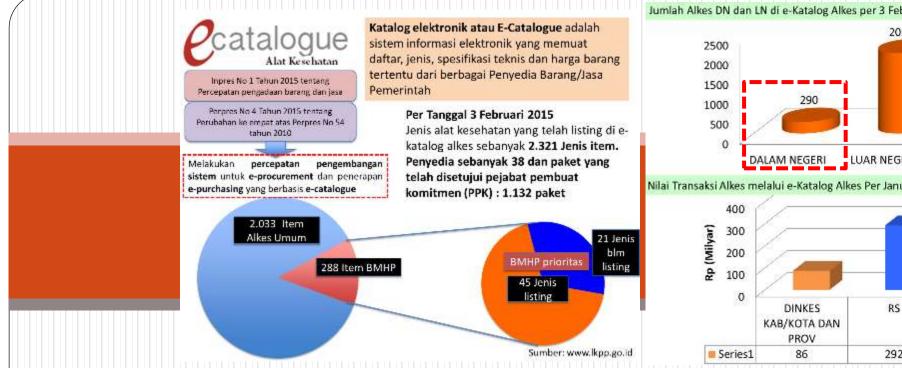
Diadaptasi dari American Association of Colleges of Pharmacy Commission to Implement Change

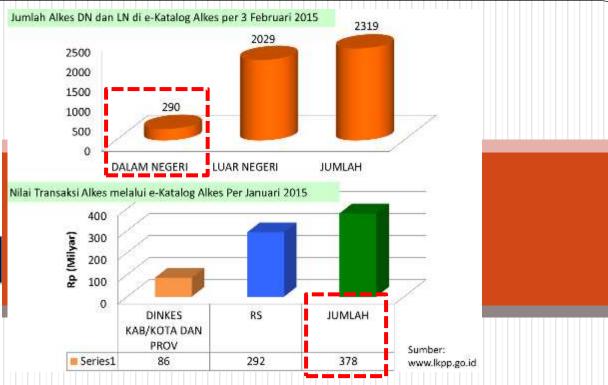
DAMPAK FORNAS BAGI PELAYANAN KESEHATAN



IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT







E-Watch Alkes

Sistem online pengawasan dan pelaporan alat kesehatan Nasional





NAWA CITA

7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

INPRES NO 2 TAHUN 2009 Tentang

Penggunaan Produk Dalam negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah



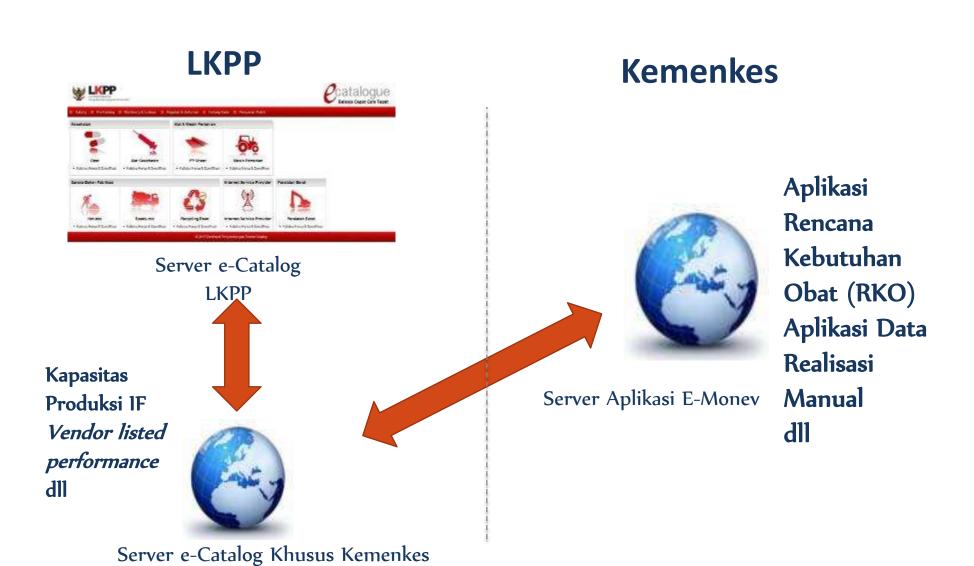
MONEV IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT (1)

Untuk monev data realisasi *e-catalogue* terhadap rencana kebutuhan obat (RKO)

Menggunakan data realisasi *e_purchasing* di LKPP, realisasi manual Kemkes dari Industri Farmasi secara berkala

Kapasitas produksi Industri Farmasi, Vendor Listed
Performance

MONEV IMPLEMENTASI *e-CATALOGUE* OBAT (2)



: Obat dan Alkes

Terima Kasih